



DEPUTI AKUNTAN NEGARA



DEPUTI AKUNTAN NEGARA

Laporan Kinerja

2021

LKIN-32/D4/03/2021 TANGGAL 30 DESEMBER 2021

KATA PENGANTAR



Renstra BPKP merupakan acuan bagi seluruh unit organisasi di lingkungan BPKP dalam penyusunan rencana strategis unit kerja. Mengacu pada Renstra BPKP tahun 2020-2024, rencana kinerja pengawasan Deputy Bidang Akuntan Negara tahun 2021 disusun untuk mendukung pencapaian tujuan Pemerintah yang menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi penerimaan negara, peningkatan serta pemerataan pembangunan infrastruktur pendukung, dan kapasitas sumber daya manusia.

Hal tersebut di atas sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pengawasan Keuangan Negara/Daerah, dan Pembangunan Nasional, termasuk pengawasan atas BUMN/BUMD. Selain itu, dalam mendukung keberhasilan pembangunan proyek strategis nasional, BPKP mendapat tugas untuk mengawal percepatan proyek strategis nasional sebagaimana dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pada tahun 2021, Deputy Bidang Akuntan Negara telah melaksanakan kegiatan pemantauan pembangunan proyek yang merupakan bagian dari program prioritas nasional. Selain pengawasan PSN, Deputy Bidang Akuntan Negara melaksanakan pengawasan terhadap tata kelola pelaksanaan kegiatan di BUMN, BUMD, BLUD, dan BUMDes. Bentuk pengawasan yang dilaksanakan dapat dikelompokkan dalam bentuk *assurance* dan *consulting*.

Kegiatan *assurance* meliputi audit bagi hasil migas, audit dengan tujuan tertentu, reviu atas asersi, reviu pengadaan barang dan jasa, asesmen GCG atas BUMN/BUMD/Badan Usaha Lainnya. Kegiatan *consulting* yang dimaksudkan untuk perbaikan tata kelola BUMN/BUMD/Badan Usaha Lainnya dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis, penyusunan dan implementasi sistem informasi akuntansi (SIA), dan pemberian jasa manajemen lainnya. Pengembangan secara terus menerus juga dilaksanakan untuk meningkatkan layanan jasa manajemen yang mencakup *Good Corporate Governance*, Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian/Lembaga, dan korporasi, SIA PDAM, dan SIA BLUD.

KATA PENGANTAR

Selain itu, terjadinya wabah pandemi *Covid-19* yang mendunia, membawa dampak dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan di BPKP, termasuk kegiatan pengawasan di Kedeputan Akuntan Negara. Dalam tahun 2021, pengawasan intern atas badan usaha dilakukan dengan berfokus pada pengawalan dan dukungan terhadap upaya yang dilakukan Pemerintah melalui program-program penanganan penanggulangan wabah *Covid-19* di bidang kesehatan, perlindungan sosial, perlindungan UMKM dan pembiayaan korporasi agar bisa berjalan secara konsisten dan dilaksanakan dengan optimal. Roda perekonomian masyarakat yang sudah mulai berputar kembali dengan dukungan stimulus dan program-program Pemerintah tersebut harus tetap dikawal agar dapat berjalan seiring dengan upaya pencegahan merebaknya kembali wabah *Covid-19*.

Hasil pengawasan dan pembinaan yang disajikan dalam laporan kinerja ini mencakup hasil yang telah dicapai beserta analisis capaian sasaran program terhadap target Renstra Deputi Bidang Akuntan Negara Periode 2020-2024. Laporan kinerja disusun merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 serta Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Akuntan Negara Tahun 2021. Laporan ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja tahun 2021, analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan kinerja.

Capaian kinerja ini akan selalu menjadi semangat dan pendorong dalam meningkatkan peran dan fungsi Deputi Bidang Akuntan Negara sesuai rencana strategis periode 2020-2024. Peningkatan kualitas hasil pengawasan senantiasa diupayakan melalui penguatan kompetensi SDM, ketaatan terhadap standar pengawasan, pengembangan implementasi SOP berbasis risiko, peningkatan kapasitas *Information and Communication Technology* (ICT) serta pemanfaatan sarana prasarana secara optimal.

Semoga laporan kinerja ini dapat memberikan umpan balik yang bermanfaat bagi penyempurnaan dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas Deputi Bidang Akuntan Negara yang terus semakin baik ke depannya.

Jakarta, 30 Desember 2021

Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara,



Sally Salamah